Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 4, Tahun 2026
Halaman : 3493-3512

Paradoks Kemiskinan : Menurunnya Angka Kemiskinan, Meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Depok Tahun 2025

The Poverty Paradox: Declining Poverty Rates And A Rising Number Of Poor Residents In Depok City In 2025

Lelly Ani
BAPPERIDA Kota Depok
lellyani79@gmail.com

ABSTRACT

The poverty rate in Depok City has shown a consistent downward trend over the years. However, despite a decline in the poverty percentage—from 2.34% in 2024 to 2.31% in 2025—the actual number of people living in poverty has increased, rising from 63,000 in 2024 to 65,000 in 2025. This phenomenon represents a "poverty paradox," where the poverty percentage decreases while both the number of impoverished individuals and the poverty line threshold increase. This policy brief aims to analyze the root causes of this paradox and provides three strategic policy recommendations to ensure that reductions in poverty rates translate into a genuine decrease in the number of people living in poverty in Depok City. The study employs a literature review methodology, examining relevant scholarly sources concerning poverty and unemployment in Depok City. Based on an analysis of potential policy alternatives, the most ideal approach involves clustering efforts to address the Open Unemployment Rate (TPT) through collaboration between the Depok City Government, the business sector, and civil society organizations. Through this collaborative framework, the initiative seeks to foster an adaptive, inclusive, and sustainable labor ecosystem. Cross-sectoral synergy will be realized through regulations, technical guidelines, integration into regional planning documents, and operational instruments—such as vocational training, competency certification, and the facilitation of partnerships with the business sector.
Keywords: *poverty, unemployment, Open Unemployment Rate (TPT), public policy, Depok City, cross-sectoral collaboration*

ABSTRAK

Tren angka kemiskinan di Kota Depok dari tahun ke tahun selalu menurun, akan tetapi meski angka persentase kemiskinan di Kota Depok mengalami penurunan dari 2,34% di Tahun 2024 menjadi 2,31% di tahun 2025, namun jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 63 ribu jiwa tahun 2024 menjadi 65 ribu jiwa di tahun 2025. Fenomena ini menunjukkan adanya "paradoks kemiskinan" dimana persentase kemiskinan tahun 2025 menurun akan tetapi jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan meningkat. Policy brief ini bertujuan menganalisis akar masalah paradoks kemiskinan tersebut dan memberikan 3 rekomendasi kebijakan strategis agar penurunan kemiskinan benar-benar berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Depok. Metode yang digunakan metode *literature review* dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait isu kemiskinan dan isu pengangguran di Kota Depok. Berdasarkan hasil analisis pilihan alternatif kebijakan yang paling ideal untuk diterapkan dibuatkan klasterisasi fokus penangangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha, dan organisasi masyarakat, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor akan diwujudkan dalam bentuk regulasi, pedoman teknis, integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta instrumen operasional berupa pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha.
Kata kunci: kemiskinan, pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kebijakan publik, Kota Depok, kolaborasi lintas sektor

1. Pendahuluan

Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga Jakarta memiliki dinamika sosial-ekonomi yang unik. Keunikan tersebut muncul dari beberapa aspek seperti

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

urbanisasi yang cepat, heterogenitas sosial**,** ketimpangan ekonomi dan akses layanan publik yang belum merata. Meski demikian, angka kemiskinan di Kota Depok relatif rendah dan lebih stagnan yakni di kisaran 2 persen. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Depok menurun dari 2,34% pada tahun 2024 menjadi 2,31% pada tahun 2025. Namun, menurunnya persentase kemiskinan tidak serta-merta mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang ideal. Masih terdapat berbagai masalah mendasar, seperti angka pengangguran yang meningkat, ketidakakuratan data penerima bantuan, ketimpangan ekonomi antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, serta belum meratanya pembangunan menyebabkan keterbatasan akses layanan publik bagi masyarakat kurang mampu.

Urbanisasi juga menimbulkan tantangan baru, karena banyak pendatang berpenghasilan rendah belum tercatat dalam sistem data resmi. Selain itu, struktur ekonomi Depok yang didominasi sektor jasa dan informal membuat sebagian masyarakat bekerja dengan pendapatan tidak stabil. Persentase penduduk miskin di Kota Depok periode 2021 sampai 2025 menunjukkan kecendrungan menurun. Sejak tahun 2021, angka kemiskinan secara konsisten melandai dari 2,58 persen di tahun 2021 menjadi 2,31 persen di tahun 2025. Penurunan persentase kemiskinan di Kota Depok dari tahun ke tahun tergambar pada gambar di bawah ini :

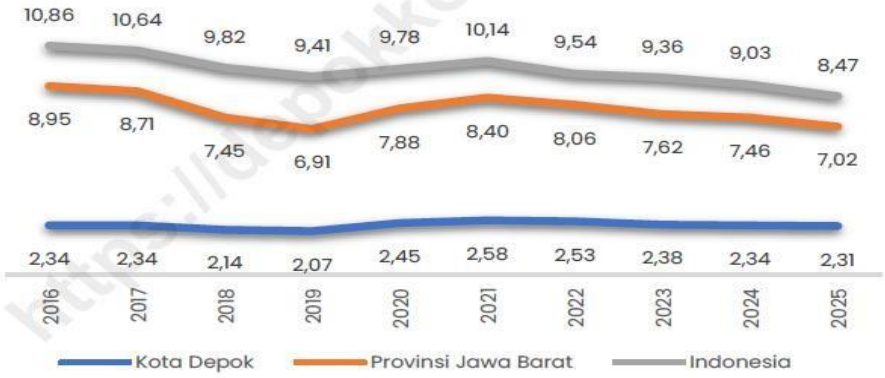


Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Miskin Kota Depok, 2006-2025

Sumber : BPS, Profil Kemiskinan Kota Depok 2025

Secara umum, persentase penduduk miskin di Kota Depok jauh lebih rendah dibandingkan angka kemsikikinan Jawa Barat dan nasional.

Perkembangan Tingkat kemiskinan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional

Sumber : BPS, Profil Kemiskinan Kota Depok 2025

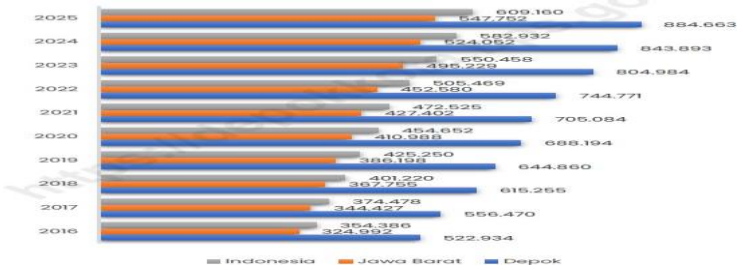
Kemiskinan secara umum dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik berupa kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Perspektif ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya sekadar keterbatasan pendapatan, melainkan ketidakmampuan ekonomi yang nyata untuk mencapai standar minimum kesejahteraan. Standar tersebut diukur melalui garis kemiskinan, yaitu nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama satu bulan. Garis kemiskinan mencerminkan batas ambang yang digunakan untuk menentukan status kemiskinan, dengan mempertimbangkan dua komponen utama:

1. Kebutuhan makanan, yang dihitung berdasarkan konsumsi kalori minimum yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif.
2. Kebutuhan nonmakanan, yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan dasar lainnya.

Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, garis kemiskinan berfungsi sebagai instrumen analisis yang objektif dan terukur dalam menilai kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Perkembangan garis kemiskinan di Kota Depok menjadi indikator penting dalam memahami dinamika kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi nilai garis kemiskinan dari tahun ke tahun mencerminkan perubahan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, serta daya beli masyarakat. Ketika garis kemiskinan meningkat, hal ini menunjukkan adanya kenaikan biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat. Sebaliknya, jika garis kemiskinan relatif stabil atau menurun, maka dapat diinterpretasikan sebagai adanya perbaikan daya beli dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Analisis perkembangan garis kemiskinan di Kota Depok juga memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Misalnya, program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kebijakan ketenagakerjaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengeluaran masyarakat sehingga mereka mampu melampaui garis kemiskinan. Dengan demikian, garis kemiskinan bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata dari kondisi kesejahteraan masyarakat. Perubahan garis kemiskinan dari waktu ke waktu menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Perkembangan garis kemiskinan Kota Depok dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang menunjukkan tren nilai rupiah pengeluaran minimum per kapita per bulan sebagai acuan dalam menentukan status kemiskinan. Perkembangan Garis Kemiiskinan Kota Depok dapat dilihat pada gambar Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Depok di bawah ini :



Gambar 3. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Depok (Rupiah/Kapita/Bulan)

Sumber : BPS, Profil Kemiskinan Kota Depok 2025

Garis Kemiskinan Kota Depok selama periode 2015 – 2025 berada di atas Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, sementara Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum nilai pengeluaran atau biaya hidup minimum seseorang yang tinggal di Kota Depok jauh di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. pada periode 2024 ke 2025, Garis Kemiskinan Kota Depok naik kembali sebesar 4,83 persen dari Rp. 843.893,- per kapita per bulan menjadi Rp. 884.663,- perkapita per bulan.

Kebijakan kemiskinan secara umum seharusnya tidak saja menurunkan angka kemiskinan, namun juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebagai dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan. **Indeks Kedalaman Kemiskinan** (*Poverty Gap Index*- P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Depok adalah 0,34 di tahun 2024 dan angka tersebut menurun menjadi 0,31 di tahun 2025.

Sedangkan **Indeks Keparahan Kemiskinan** (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2025 angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) di Kota Depok tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 yakni 0,07. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Depok dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Depok

Sumber : BPS, Profil Kemiskinan Kota Depok 2025

Secara garis besar data kemiskinan di Kota Depok tahun 2024 dan 2025 dapat disusun ke dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kemiskinan Di Kota Depok tahun 2024 dan 2025

URAIAN	2024	2025
Persentase Kemiskinan (persen)	2,34	2,31
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	62,6	63,4
Garis Kemiskinan (Rupiah/perkapita/bulan)	843,893	884,663
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,34	0,31
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,07	0,07

Sumber : diolah 2026

Pada tabel tersebut di atas menggambarkan adanya paradoks kemiskinan di Kota Depok yang mana persentase kemiskinan menurun dari tahun 2024 sebesar 2,34% menjadi 2,31% di tahun 2025 namun jumlah penduduk miskinnya meningkat yang semula 62,6 ribu orang di tahun 2024 menjadi 63,4 ribu orang di tahun 2025.

Berdasarkan data dan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk menyusun sebuah *policy brief* yang berfokus pada analisis fenomena penurunan persentase kemiskinan namun di sisi lain jumlah penduduk miskin di Kota Depok justru mengalami peningkatan selama periode tahun 2024–2025. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, di mana indikator persentase kemiskinan yang menurun tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan secara menyeluruh. *Policy brief* ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab. terjadinya kontradiksi tersebut, antara lain: pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan penurunan angka kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, serta keterbatasan akses kelompok rentan terhadap layanan sosial dan kesempatan kerja. Analisis ini juga akan menyoroti implikasi kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Depok agar strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan persentase, tetapi juga mampu mengurangi jumlah absolut penduduk miskin secara nyata. Dengan menyusun *policy brief* ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Rekomendasi tersebut akan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi Kota Depok. **Isu** : Peningkatan Jumlah penduduk miskin di Kota Depok tahun 2025 Masalah

1. Kenaikan angka tingkat pengangguran terbuka (sumber : https://depok.voa.co.id/berita/2579/kemiskinan-depok-turun-2025-data-bps/)
2. Integrasi bantuan sosial (sumber : https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/5722/2759)
3. Ketimpanganekonomi (sumber : https://docs.google.com/document/d/1w9z0N7zsbroPQQh0WGkP2qQjBYuNPq-PYhVw-K5kazI/edit?tab=t.0)

Masalah Utama

Berdasarkan pendapat dan hasil diskusi terkait tema dari 5 (lima) responden, didapat data sebagai berikut :

Masalah Utama	*Urgency*	*Seriousness*	*Growth*	Total Nilai
Kenaikan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4+5+5+5+5=24	4+5+5+5+5=24	4+5+5+5+4=23	71
Integrasi Bantuan Sosial	3+3+5+5+3=16	3+3+5+4+3=18	3+3+5+5+5=21	55
Ketimpangan Ekonomi	5+4+3+4+3=19	5+4+4+3+4=20	5+4+5+3+4=21	60

Dari hasil olah data tersebut di atas yang menjadi masalah utama adalah Kenaikan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka.

Penyebab masalah level 1 yakni :
1. Pertumbuhan Angkatan Kerja Tidak Seimbang
2. Urbanisasi dan Migrasi Penduduk
3. Pertumbuhan Ekonomi yang melambat

Penyebab masalah level 2 :
Mengapa terjadi masalah 2.a. **Pertumbuhan Angkatan Kerja Tidak Seimbang**
Penyebab :
2a.1. Ketidaksesuaian pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi individu
2a.2. Disparitas kualitas di antara institusi pendidikan
2a.3. Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

Mengapa terjadi masalah 2.b. Urbanisasi dan Migrasi Penduduk Penyebab :
2b.1. Mencari tempat tinggal 2b.2. Melanjutkan Pendidikan 2b.3. Mencari pekerjaan

Mengapa terjadi masalah 2.c. Pertumbuhan Ekonomi Melambat Penyebab :
2c.1. Produk Domestik regional Bruto (PDRB)
2c.2. Ketergantungan pada sektor tertentu (jasa dan perdagangan) 2c.3. Pembangunan Infrastruktur yang tidak merata

Akar Masalah
Akar masalah 1 : 2a.2. Ketidaksesuaian pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi individu yang ada
Akar masalah 2 : 2.a. Pertumbuhan Angkatan Kerja Tidak Seimbang Akar masalah 3 : Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Problem statement :
Ketidaksesuaian pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi individu menyebabkan Pertumbuhan Angkatan Kerja Tidak Seimbang sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok meningkat.

Analisis Dan Pembahasan
2.2 Teori

Secara umum, pekerjaan dapat diartikan semua aktivitas yang dilakukan sesorang secara rutin dan terstruktur dengan menggunakan kemampuan/kompetensi untuk menghasilkan pendapatan. Dalam profil ketenagakerjaan Kota Depok Hasil Sakernas Agustus 2025 menyebutkan, **Angkatan kerja** terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya Konsep dan Definisi

Angkatan Kerja merupakan konsep yang digunakan untuk mengetahui jumlah

penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah Angkatan Kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Jumlah Angkatan Kerja merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK inilah yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sebaliknya TPAK juga dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja.

Selain TPAK, salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak

mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya. Pengangguran Terbuka tidak termasuk bagi penduduk yang sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga. TPT dihitung berdasarkan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Ketiadaan penghasilan mengakibatkan pengangguran, pendapatan masyarakat akan berkurang akibat dari pengangguran, dan hal ini akan menurunkan tingkat kemakmuran yang pada jangka panjang menyebabkan kemiskinan (Yusrya,2023).

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 penduduk usia kerja Kota Depok mencapai 1.714.49 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.063.021 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 651.471 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok pada tahun 2025 sebesar 62,00 persen. Nilai TPAK tahun 2025 ini turun 0,89 poin dibandingkan dengan tahun 2024. Secara umum penurunan TPAK dapat diartikan sebagai semakin sedikitnya penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar kerja. Hal ini diantaranya bisa disebabkan oleh menurunnya peluang kerja atau kondisi pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi angkatan kerja yang ada. Penurunan TPAK juga bisa diinterpretasikan karena adanya *mismatch* Pendidikan yang telah diselesaikan dengan ketersediaan lapangan kerja, seperti lebih banyak individu sarjana yang memilih melanjutkan pendidikan atau memilih-milih pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. (BPS, Profil Ketenagakerjaan Kota Depok Hasil Sakernas Agustus 2025)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. Selama kurun waktu tahun 2021-2025, TKK di Kota Depok cenderung terus meningkat, namun mengalami penurunan di tahun 2025. Pada tahun 2021, Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 90,24 persen meningkat menjadi 93,73 persen pada tahun 2024. Penurunan TKK pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 menjadi 93,48 persen bisa disebabkan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan jumlah angkatan kerja atau ketidaksesuaian pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi individu yang ada. (BPS, Profil Ketenagakerjaan Kota Depok Hasil Sakernas Agustus 2025)

Peningkatan jumlah para pencari kerja yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah perluasan kesempatan kerja merupakan penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran terbuka

di Kota Depok dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami kenaikan sebesar 3,00 poin dibandingkan dengan tahun 2024, angka pengangguran terbuka tersebut menjadi 40,30 persen di tahun 2025. Penduduk yang termasuk pengangguran terbuka yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami sedikit kenaikan di tahun 2025 menjadi 18,71 persen. Persentase pengangguran terbuka di tingkat SMA dan SMK yang masih cukup besar menjadikan tantangan penyediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi SMK. Terlebih lagi lulusan SMK sudah disiapkan untuk menghadapi langsung dunia kerja dalam kurikulumnya. Persentase Pengangguran Terbuka dengan tingkat pendidikan Diploma IV ke atas mengalami penurunan 2,33 poin yaitu dari 24,21 persen di tahun 2024 menjadi 21,88 persen di tahun 2025. (BPS, Profil Ketenagakerjaan Kota Depok Hasil Sakernas Agustus 2025)

Sebagai solusi atas permasalahan di atas sehingga tercipta tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan kerja dan kesempatan kerja di Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Dibuatkan Klasterisasi fokus penangangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk Pendidikan formal dan informal dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat diikuti oleh angkatan kerja.
2. Pelatihan keterampilan/*soft skill* tenaga kerja yang inklusif, lintas sektor dan tepat sasaran;
3. Menyusun kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian berbasis kompetensi bagi Sekolah SMK.

Alternatif Kebijakan

3.1 Perumusan Alternatif Pilihan Kebijakan

1. Dibuatkan klasterisasi fokus penangangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk Pendidikan formal dan informal dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat diikuti oleh angkatan kerja;
   Alternatif kebijakan ini adalah upaya untuk mengurangi TPT dan kemiskinan secara berkelanjutan, yang tujuannya untuk menyelaraskan Pendidikan dengan kebutuhan industri, meningkatkan kualitas dan daya saing Angkatan kerja, mendorong dunia usaha dan partisipasi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru yang inklusif.
2. Pelatihan keterampilan/*soft skill* tenaga kerja yang inklusif, lintas sektor dan tepat sasaran;
   Alternatif Kebijakan ini untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ketrampilan dengan pola pelatihan lintas sektor yang mana pelatihan tenaga kerja ini berlaku juga bagi penyandang disabilitas sehingga terwujudlah peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi dan pengembangan manajemen secara terpadu dan harmonis antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
3. Menyusun kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian berbasis

kompetensi bagi Sekolah SMK;
Alternatif kebijakan ini untuk mewujudkan tidak adanya mismatch Pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang lndustri, standar internasional, dan/atau standar khusus.

3.2 Metode yang digunakan

Metode yang digunakan metode *literature review* dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait isu kemiskinan dan isu pengangguran di Kota Depok. Data diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar, situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dengan fokus pada publikasi yang memuat data empiris dan analisis kebijakan ketenagakerjaan. Setiap literatur diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, serta kesesuaiannya dengan tema. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui proses sintesis terhadap temuan-temuan utama untuk mengidentifikasi masalah, faktor penyebab, dampak sosial ekonomi, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran (Amelia, Sofia dkk; BPS, 2026). Metode penilaian dan hasil pemilihan

3.3 Metode penilaian dan hasil pemilihan

Alternatif Kebijakan	Komponen penilaian	Skor	Rata-rata	Keterangan
Dibuatkan klasterisasi fokus penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk Pendidikan formal dan informal dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat diikuti oleh angkatan kerja	Efektivitas	5	4.2	klasterisasi yang difokuskan pada penanganan TPT melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat memiliki rata-rata skor paling tinggi sehingga merupakan alternatif kebijakan paling ideal untuk diterapkan.
	Biaya	3		
	Keberlanjutan	4		
	Dampak Sosial	5		
	Kemudahan Implementasi	4		
Pelatihan keterampilan/*soft skill* tenaga kerja yang inklusif, lintas sektor dan tepat sasaran	Efektivitas	4	3.6	Pelatihan keterampilan/*soft skill* tenaga kerja yang inklusif, lintas sektor dan tepat sasaran, masih memiliki kendala pada bagian efektivitas juga kemudahan implementasi sehingga belum ideal untuk diterapkan.
	Biaya	3		
	Keberlanjutan	4		
	Dampak Sosial	4		
	Kemudahan Implementasi	3		

Menyusun kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian berbasis kompetensi bagi Sekolah SMK Alternatif Kebijakan Dibuatkan klasterisasi fokus penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk Pendidikan formal dan informal dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat diikuti oleh angkatan kerja	Efektivitas	5	4.0 Rata-rata 4.2	kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian berbasis kompetensi bagi Sekolah SMK memiliki efektivitas tinggi namun masih terkendala pada biaya dan kemudahan implementasi. Keterangan klasterisasi yang difokuskan pada penanganan TPT melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat memiliki rata-rata skor paling tinggi sehingga merupakan alternatif kebijakan paling ideal untuk diterapkan.
	Komponen penilaian	Skor		
	Efektivitas	5		
berbasis kompetensi bagi Sekolah SMK	Biaya	3		Sekolah SMK memiliki efektivitas tinggi namun masih terkendala pada biaya dan kemudahan implementasi.
	Kemudahan Implementasi	3		

3.4 Pilihan Kebijakan Utama yang Direkomendasikan

Berdasarkan pertimbangan tabel penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan alternatif kebijakan yang paling ideal untuk diterapkan adalah dibuatkan klasterisasi fokus penangangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk Pendidikan formal dan informal dalam menciptakan lapangan kerja yang diikuti oleh angkatan kerja merupakan alternatif yang paling memungkinkan dari segi efektivitas, memiliki dampak keberlanjutan dan sosial yang tinggi, serta merupakan implementasi yang paling mudah dengan biaya yang sedikit.

Kesimpulan Dan Rekomendasi Kebijakan

4.1. Sintesa temuan atas permasalahan utama

Permasalahan utama dalam Kenaikan angka tingkat pengangguran terbuka adalah Pertumbuhan Angkatan Kerja Tidak Seimbang, Urbanisasi dan Migrasi Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi yang melambat. Akar masalah tersebut karena belum adanya teknis klasterisasi fokus penangangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, Dunia Usaha dan Organisasi Masyarakat untuk Pendidikan formal dan informal dalam menciptakan lapangan kerja

yang diikuti oleh angkatan kerja, sehingga sistem yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam membuka lapangan kerja belum terwujud dan berjalan secara optimal. Kondisi ini dalam jangka panjang berpotensi akan menyulitkan upaya pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Depok.

4.2. Rekomendasi Kebijakan Utama

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, serta hasil penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia, maka ditetapkan rekomendasi kebijakan utama berupa **Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**. Program ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Depok, Dunia Usaha, dan Organisasi Masyarakat, dengan fokus pada pengembangan pendidikan formal maupun informal sebagai instrumen strategis dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi angkatan kerja.

Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengintegrasikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, memperluas akses pelatihan vokasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan klasterisasi, setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi : pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai penyedia lapangan kerja dan mitra pelatihan, serta organisasi masyarakat sebagai penggerak pemberdayaan komunitas.

Tujuan utama program klasterisasi harapannya dapat :

- Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok secara signifikan.
- Meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.
- Menciptakan ekosistem kerja yang inklusif melalui kolaborasi lintas sektor.
- Memperkuat peran masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
- Mendorong keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Kota Depok menetapkan regulasi atau kebijakan yang berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh kegiatan yang akan dijalankan. Kebijakan ini menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap tahapan program memiliki dasar hukum yang jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam pedoman teknis yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan program, meliputi:

- Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.
- Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga kurikulum dan pelatihan vokasi relevan dengan tuntutan pasar kerja.
- Pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor, guna menciptakan sinergi yang efektif.
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, untuk menilai capaian program dan melakukan perbaikan kebijakan.
- Penyusunan laporan berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- Sinkronisasi data hasil evaluasi, agar kebijakan berbasis pada bukti empiris yang

valid.

- Keterbukaan informasi publik, guna menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan regulatif dan teknis tersebut, diharapkan terbentuk sistem ketenagakerjaan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan pengangguran terbuka di Kota Depok secara komprehensif.

Pedoman teknis yang telah disusun harus terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok, sehingga program klasterisasi ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah dan memperoleh dukungan anggaran serta kebijakan lintas sektor.

Dokumen pedoman teknis yang telah disusun harus memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat dijadikan acuan resmi dalam pelaksanaan program, maka Pemerintah Kota Depok menetapkannya menjadi Peraturan Wali Kota (Perwal). Penetapan pedoman teknis klasterisasi penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke dalam bentuk Perwal memberikan legitimasi hukum yang jelas, sehingga seluruh mekanisme kerjasama lintas sektor, penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, pembagian peran, monitoring dan evaluasi, serta keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur. Dengan adanya Perwal sebagai dasar hukum, pedoman teknis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Hal ini memastikan bahwa program klasterisasi TPT di Kota Depok berjalan sesuai prinsip etika, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun pedoman teknis ini mencakup beberapa ruang lingkup utama yakni:

1. Pendidikan dan Pelatihan
   - Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri.
   - Penguatan program vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi digital.
   - Magang terstruktur di perusahaan mitra.
   - Adanya inkubator bisnis sebagai *pilot project*
2. Ketenagakerjaan
   - Penciptaan lapangan kerja melalui klasterisasi sektor unggulan (IT, jasa kreatif, perdagangan, UMKM).
   - Dengan bentuk skema pembelajaran gabungan antara belajar langsung di tempat kerja bersama mentor atau pekerja berpengalaman dan pembelajaran teori di kelas atau pusat pelatihan berbasis kebutuhan industri.
3. Kerjasama Lintas Sektor
   - Pembagian peran antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.
   - Dunia usaha sebagai penyedia lapangan kerja dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
   - Organisasi masyarakat sebagai pendamping usaha kecil dan fasilitator program.
4. Monitoring dan Evaluasi
   - Mekanisme pelaporan hasil program secara berkala.
   - Sinkronisasi dan pemadanan data hasil evaluasi.
   - Keterbukaan informasi publik terkait capaian program.
5. Partisipasi Publik
   - Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

- Mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam pemberdayaan tenaga kerja.

Sasaran kebijakan Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok ditetapkan secara terarah untuk memastikan efektivitas intervensi dan keberlanjutan hasil yang dicapai. Kebijakan ini menempatkan kelompok sasaran utama sebagai berikut:

1. Angkatan kerja muda yang baru menyelesaikan pendidikan formal maupun non-formal, dengan tujuan mempercepat transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan fasilitasi penempatan kerja.
2. Masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan akses terhadap pekerjaan layak, sehingga kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi sekaligus pengurangan angka kemiskinan.
3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi sebagai mitra strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat basis ekonomi daerah melalui pengembangan usaha produktif.
4. Dunia usaha sebagai pihak yang menyediakan lapangan kerja dan menentukan kebutuhan kompetensi, sehingga menjadi mitra utama dalam penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan tuntutan pasar kerja.
5. Organisasi masyarakat sebagai pendamping dan fasilitator program, berperan dalam pemberdayaan komunitas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta memastikan keterjangkauan program bagi kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Dengan penetapan sasaran kebijakan yang komprehensif ini, diharapkan program klasterisasi mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap penurunan TPT dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Pada saat Kebijakan Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok diimplementasikan, sejumlah Perangkat Daerah (PD) dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Adapun Perangkat Daerah yang terlibat tersebut sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, antara lain :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Depok :
   - Mengintegrasikan program klasterisasi ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok, Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
   - Memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral, hal ini dilakukan agar setiap perangkat daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat memiliki arah kebijakan yang sama, sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
   - Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai dokumen operasional yang memuat kegiatan, target kegiatan, indikator capaian, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan. Rencana aksi ini berfungsi sebagai panduan implementasi program secara tahunan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok :

Menyusun, memproses dan mengkoordinasikan regulasi Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum pelaksanaan pedoman teknis klasterisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3. Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Depok :
   - Sebagai *leading sector*, bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja.
     Disnaker bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis yang menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan teknis ini mencakup penyusunan pedoman pelatihan vokasi, mekanisme sertifikasi kompetensi, serta prosedur fasilitasi penempatan tenaga kerja. Dengan adanya kebijakan teknis yang jelas, diharapkan setiap kegiatan dapat berjalan sesuai standar dan kebutuhan dunia usaha. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan tuntutan pasar kerja, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja di sektor formal maupun informal. Selain itu, Disnaker juga berfungsi sebagai fasilitator penempatan tenaga kerja, dengan menjembatani lulusan pelatihan vokasi dan dunia usaha. Fasilitasi ini dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, penyediaan informasi lowongan kerja, serta dukungan terhadap program magang.
   - Menjadi koordinator utama dalam monitoring dan evaluasi program klasterisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
     Fungsi ini mencakup pengumpulan data, penyusunan laporan berkala, sinkronisasi hasil evaluasi antar sektor, serta penyampaian informasi kepada publik. Dengan koordinasi yang kuat, program dapat dipantau

4. Dinas Pendidikan (DISDIK) Kota Depok
   - Berperan dalam penyelarasan kurikulum pendidikan formal dan nonformal dengan kebutuhan dunia usaha;
     Penyelarasan ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan kompetensi yang relevan ke dalam kurikulum sekolah formal maupun nonformal. Proses ini mencakup identifikasi keterampilan yang dibutuhkan industri, penyesuaian mata pelajaran atau modul pelatihan, serta penerapan metode pembelajaran berbasis praktik kerja (*workplace learning*). Dengan demikian, lulusan pendidikan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
   - Mendukung pengembangan program pendidikan berbasis keterampilan.
     Pengembangan program pendidikan berbasis keterampilan diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan program *apprenticeship*. Program ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan teknis maupun soft skills, seperti literasi digital, komunikasi, dan problem solving.
5. Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok
   - Menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai penyerap tenaga kerja lokal.
   - Mendorong terbentuknya klaster usaha produktif yang berkelanjutan.
     Dinas Koperasi dan UMKM sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Peran ini diwujudkan melalui dukungan terhadap penguatan kapasitas usaha lokal agar mampu menjadi penyerap

tenaga kerja yang signifikan. Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi akses permodalan, pendampingan manajemen usaha, serta peningkatan keterampilan kewirausahaan bagi pelaku UMKM dan anggota koperasi. Dengan demikian, UMKM dan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi produktif, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Dinas Sosial (DINSOS) Kota Depok
   - Menyiapkan data warga miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi dengan satu data. Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berlapis, melibatkan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, serta lembaga terkait, sehingga data yang dihasilkan akurat, mutakhir, dan dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Prinsip satu data ini penting untuk menghindari tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran, serta meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan
   - Memberikan dukungan terhadap masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial.
     Dengan adanya perlindungan sosial, masyarakat miskin dan rentan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
   - Menjadi penghubung antara kebijakan ketenagakerjaan dengan program pengentasan kemiskinan.
     Hal ini diwujudkan melalui integrasi program pelatihan vokasi dan penempatan kerja dengan program perlindungan sosial, sehingga masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Depok
   Memastikan data kependudukan warga penerima program klasterisasi dengan melakukan pemadanan data. Dengan pemadanan data yang akurat, program pengklasterisasi tidak salah sasaran, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan dalam pelaksanaan intervensi pemerintah lebih efektif, efisien dan ekonomis.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Depok
   - Mengelola sistem informasi ketenagakerjaan terpadu.
     Dengan adanya sistem informasi terpadu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat mengakses data yang sama, sehingga kebijakan yang diambil lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
   - Menjamin keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan dan capaian program. Keterbukaan informasi ini diwujudkan melalui kanal informasi resmi Pemerintah Kota Depok, baik dalam bentuk portal daring, laporan berkala, maupun publikasi media. Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program. Kemudahan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat dapat mengetahui perkembangan program, capaian target, serta peluang kerja yang tersedia
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISDAGIN) Kota Depok
   Dalam mendukung pelaksanaan Program Disdagin memiliki peran strategis yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja baru.

- Mendukung pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagai penyerap tenaga kerja. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi perizinan usaha, pembinaan industri kecil dan menengah, serta pengembangan pusat perdagangan lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Selain itu, Disperindag juga mendorong inovasi dan modernisasi proses produksi agar industri di Kota Depok dapat bersaing di pasar regional maupun nasional, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
- Memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
  Peran ini mencakup penyelenggaraan forum bisnis, kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar, serta pengembangan rantai pasok yang melibatkan tenaga kerja lokal. Melalui kerjasama tersebut, dunia usaha tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program magang, pelatihan berbasis industri, dan penyerapan lulusan vokasi

10. Kecamatan dan kelurahan di Kota Depok
    Sebagai garda terdepan peran kecamatan dan kelurahan dalam implementasi kebijakan klasterisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat penting, peran aktif kecamatan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat kota benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung sehingga tidak ada warga yang tidak terinfokan, tidak terdata dan tidak tersentuh dalam program ini.

Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut mencerminkan pendekatan multi-sektor dalam kebijakan penanganan Tingkat Penganggran Terbuka (TPT). Sinergi antar Perangkat Daerah tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan klasterisasi mampu menjangkau seluruh aspek pembangunan daerah, mulai dari bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.

Pelaksanaan Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok diharapkan memberikan dampak nyata yang terukur baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dampak tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Dampak Jangka Pendek
   Dalam tahap awal implementasi, kebijakan ini akan menghasilkan :
   - Tersedianya pedoman teknis yang jelas sebagai acuan pelaksanaan program, sehingga setiap aktor memiliki panduan yang terstandar.
   - Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam penanganan Tingkat Pennganggguran Terbuka (TPT), yang memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.
2. Dampak Jangka Menengah, Seiring berjalannya pelaksanaan Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diharapkan tercapai:
   - Peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
   - Terserapnya angkatan kerja lokal ke dalam sektor-sektor produktif, baik formal maupun informal.
   - Penurunan signifikan angka pengangguran terbuka di Kota Depok sebagai indikator keberhasilan kebijakan.
3. Dampak Jangka Panjang

Dalam horizon pembangunan jangka panjang, kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan:

- Masyarakat daerah yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, dengan akses kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.
- Penguatan daya saing ekonomi daerah melalui tenaga kerja berkualitas yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok, khususnya pada dimensi pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Kerangka dampak yang terstruktur ini memperkuat kebijakan klasterisasi tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek terhadap angka pengangguran, tetapi juga sebagai strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

Pelaksanaan Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok dirancang dengan tahapan waktu yang terstruktur perencanaannya, sehingga capaian kebijakan dapat diukur secara bertahap dan berkelanjutan. Periode waktu tersebut adalah :

- Periode Tahunan : Program ini diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mekanisme evaluasi capaian setiap tahun yang dilakukan semua sektor pengampuh. Evaluasi tahunan berfungsi sebagai instrumen koreksi kebijakan sekaligus memastikan konsistensi pelaksanaan program.
- Periode Jangka Menengah (5 tahun) : Program dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan target utama berupa penurunan

  Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan. Dengan menyusun strategi dan arah kebijakan yang jelas, jangka waktu lima tahun ini menjadi kerangka strategis untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
- Periode Jangka Panjang (20 tahun) : Program diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, dengan tujuan membangun sistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Jangka dua puluh tahun ini menekankan pada penguatan daya saing ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Dengan demikian, Program Klasterisasi Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.

Komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan perangkat daerah terkait menjadi fondasi utama bagi keberhasilan program ini. Dengan dukungan regulasi yang kuat, perencanaan yang terukur, serta pelaksanaan yang konsisten, kebijakan klasterisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Depok, sekaligus meneguhkan posisi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2022 tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok.

Bappeda Kota Depok. 2025. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Tahun 2025-2029.

BPS Kota Depok, volume 5. 2025. Profil Kemiskinan Kota Depok Tahun 2025 BPS Kota Depok, volume XXII. 2026. Kota Depok Dalam Angka Tahun 2026

BPS Kota Depok, volume 6. 2026. Profil Ketenagakerjaan Kota Depok Hasil Sakernas Agustus 2025

Disdukcapil Kota Depok. 2025. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024 Kirana, Astri dkk. 2025. Kajian Program Magang Desa Cemara. Rumah Layak Untuk Semua: Memastikan Ketepatan Sasaran dan Efektifitas Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Cipayung.

Syaukani, A. S., & Adi, I. R. 2026. Integrasi Program Bantuan Sosial dalam Sistem Perlindungan Sosial Daerah: Studi Pada Pemerintah Kota Depok. https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5722

Yusrya, Nabila. 2023. Analisis Pengaruh PDB, Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1997-2020. https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/699/692

Amelia, Sofia dkk. 2025. Analisi Isu Pengangguran di Indonesia : Literature Review. https://ojs.ubesco.com/index.php/jikm/article/view/1224/1367

Rooma21 Institute. 2025. Keunggulan tinggal di Kota Depok : Kota Pendidikan dengan Akses transportasi terlengkap, Sumber : https://rooma21.com/blogproperti/article/7-keunggulan-tinggal-di-depok-kota-pendidikan-dengan-akses-transportasi-terlengkap

Voa Depok. 2026. Kenaikan angka tingkat pengangguran terbuka. (sumber : https://depok.voa.co.id/berita/2579/kemiskinan-depok-turun-2025-data-bps/

Kompas Data. Kota Depok menjadi tujuan utama pendatang baru, sumber : https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6452571b68b0d1e9c9bd879e

Radar Depok. 2026. Luar Biasa, Capaian Investasi di Depok Sentuh Rp 5,5 Triliun : Ini Data dan Faktanya. Sumber : https://www.radardepok.com/utama/94616625035/luar-biasa-capaian-investasi-di-depok-sentuh-rp55-triliun-ini-data-dan-faktanya?page=2

Kompas.id. 2022. Kota Depok, Tetangga Jakarta yang jadi magnet bagi para pendatang. https://www.kompas.id/artikel/tantangan-kota-depok-menghadapi-arus-urbanisasi